

LAPORAN AKHIR TAHUN



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya, Penyusunan Laporan Akhir Tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 telah selesai dilaksanakan .

Laporan ini berisikan uraian Gambaran umum SKPD, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi serta Realisasi Program/Kegiatan serta Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terlaksananya penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Tanjung Selor, 2 Januari 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,

Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19691103 199403 1 003

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akhir Tahun ini dibuat sebagai salah satu pemenuhan kewajiban Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan. Dalam rangka memasuki awal tahun anggaran yang baru, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Akhir Tahun secara sistematis.

1.1. Maksud dan Tujuan

Pembuatan Laporan Akhir Tahun ini dimaksudkan sebagai salah satu pemenuhan kewajiban setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait pelaksanaan program/kegiatan dalam tahun anggaran. Laporan akhir tahun ini memuat program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Organisasi Perangkat Daerah, di dalam laporan ini memuat Realisasi Program dan Kegiatan baik fisik maupun keuangan, Capaian Kinerja, Permasalahan dan tindak lanjut serta dokumentasi kegiatan.

Tujuan Laporan Akhir Tahun ini adalah sebagai bahan evaluasi agar dalam pelaksanaan tahun selanjutnya dapat dilakukan perbaikan dan percepatan pelaksanaan program/kegiatan.

1.2. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada Laporan Akhir Tahun ini disampaikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi mengenai Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum SKPD

Memaparkan gambaran Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi serta Sumber Daya yang dimiliki baik Manusia, Aset maupun Anggaran

Bab III Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Menggambarkan capaian yang telah dilaksanakan pada tahun yang dilaporkan dan Permasalahan yang dihadapi serta rencana tindak lanjut

BAB IV Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM SKPD

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Layanan Pengeadaan Secara Elektronik yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

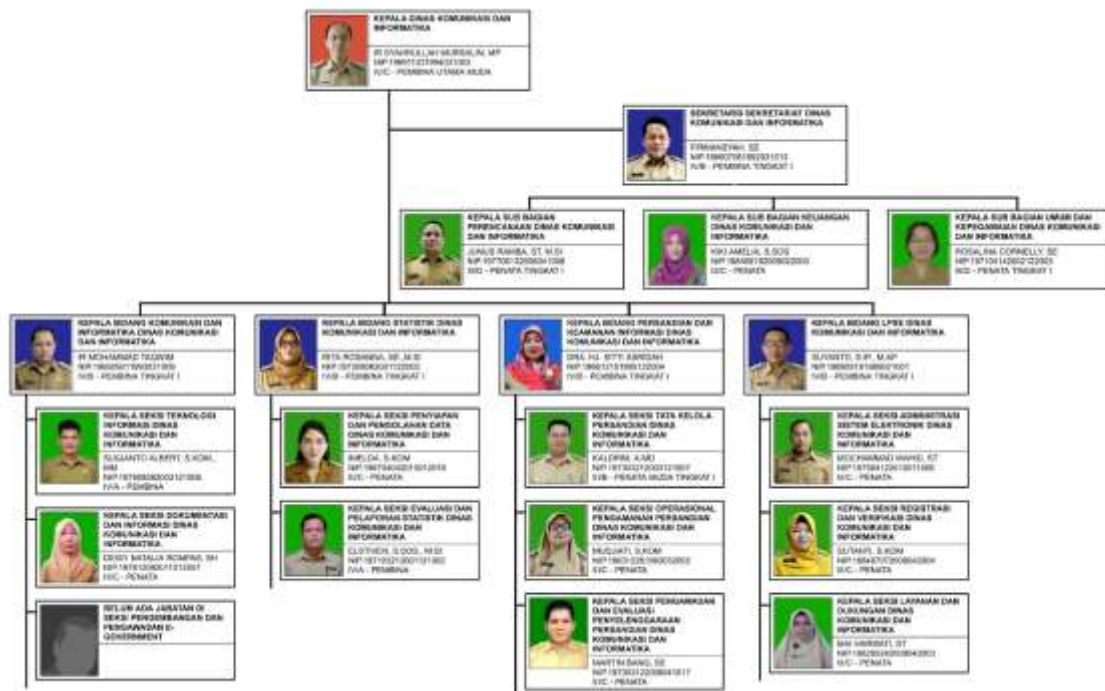
2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Aplikasi Informatika;
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Statistik Sektoral;
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- f. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya,

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		L	P
1	SMA/SMK	00	02
2	Sarjana Muda (D-III)	08	00
3	Sarjana (S1/D-IV)	11	12
4	Pasca Sarjana (S-2)	05	01
	Jumlah	24	15
	TOTAL	39	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Diskominfo Prov. Kaltara Tahun 2019

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	
		L	P
1	I/a Juru Muda	00	00
2	I/b Juru Muda Tk. I	00	00
3	I/c Juru	00	00
4	I/d Juru Tk. I	00	00
5	II/a Pengatur Muda	00	00
6	II/b Pengatur Muda Tk. I	00	00
7	II/c Pengatur	02	02
8	II/d Pengatur Tk. I	04	00
9	III/a Penata Muda	06	02
10	III/b Penata Muda Tk. I	03	02
11	III/c Penata	02	06
12	III/d Penata Tk. I	01	01
13	IV/a Pembina	02	00
14	IV/b Pembina Tk. I	03	02
15	IV/c Pembina Utama Muda	01	00
16	IV/d Pembina Utama Madya	00	00
	Jumlah	24	15
	TOTAL	39	

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah	
		L	P
1	Eselon II	01	00
2	Eselon III	03	02
3	Eselon IV	06	07
	Jumlah	10	09
	TOTAL	19	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Diskominfo Prov. Kaltara Tahun 2019

Tabel 2.4.
Komposisi Tenaga Kontrak

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		L	P
1	SLTA	00	02
2	D-III/ D-IV	01	00
3	S-1	03	04
4	S-2	00	00
	Jumlah	04	06
	TOTAL	10	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Diskominfo Prov. Kaltara Tahun 2019

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan

No	Struktural dan Fungsional	L	P
1	Kadis Kominfo Prov. Kaltara	01	00
2	Sekretaris	01	00
a	Sub Bagian Perencanaan Program	01	00
b	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	00	01
c	Sub Bagian Keuangan	00	01
3	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika	01	00
a	Seksi Teknologi Informasi	01	00

b	Seksi Dokumentasi dan Informatika	00	01
c	Seksi Pengembangan dan Pengawasan E-Government	00	00
4	Kepala Bidang LPSE	01	00
a	Seksi Administrasi Sistem Elektronik	01	00
b	Seksi Registrasi dan Verifikasi	00	01
c	Seksi Layanan dan Dukungan	00	01
5	Kepala Bidang Statistik	00	01
a	Seksi Penyiapan dan Pengolahan Data	00	01
b	Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik	01	00
6	Kepala Bidang Persandian	00	01
a	Seksi Tata Kelola Persandian	01	00
b	Seksi Operasional Pengamanan Persandian	00	01
c	Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian	01	00
	Jumlah	10	09
	TOTAL	19	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Diskominfo Prov. Kaltara Tahun 2019

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kantor

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor, kendaraan dinas, inventarisasi dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan beberapa dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2.6

Komposisi Kendaraan Dinas/Operasional

No	JENIS KENDARAAN	MEREK	NOPOL	TAHUN
	RODA EMPAT			
1	Mobil	Toyota Kijang Innova	KU 34 B	2017
2	Mobil	Toyota Avanza Veloz	KU 1011 B	2017
3	Mobil	Toyota Avanza Veloz	KU 1012 B	2017
4	Mobil	Toyota Rush	KT 1110 HI	2013
5	Mobil	Toyota Rush	KT 1108 HI	2013
6	Mobil	Toyota Avanza		
7	Mobil	Toyota Hilux	KT 8011 HI	2013
	RODA DUA			
4	Motor	Honda Vario 150	KU 2238 AA	2017
5	Motor	Honda Vario 150	KU 2239 AA	2017
6	Motor	Honda Vario 150	KU 2240 AA	2017
7	Motor	Honda Vario 150	KU 2241 AA	2017
8	Motor	Honda Vario 150	KU 2242 AA	2017
9	Motor	Honda Vario 150	KU 2243 AA	2017

Sumber : Database Sub. Bagian Umum Diskominfo Prov. Kaltara Tahun 2018

Tabel 2.7**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**

No	TANGGAL TERIMA	BARANG	UNIT	KETERANGAN
1	03/04/2017	Mesin Fax Panasonic KX-FP701CX	1	
2	10/04/2017	Laptop Lenoco Thinkpad Edge E470	1	
3	10/04/2017	PC Lenovo Ideacentre Slim 23"	1	
4	10/04/2017	PC Asus Vivo V230ICGT-BF108X OHB All-in-One	1	
5	10/04/2017	Laptop HP Business Probook 430 G4	2	
6	10/04/2017	Printer Brother MFC-J3720 Ink Benefit	1	
7	10/04/2017	PC HP All in One PC 24-g026d	2	
8	10/04/2017	Elektronik Typewriter Nakajima AX 150	1	
9	13/04/2017	Rangka Lemari Besi	1	
10	21/04/2017	Back-UPS, UPS (APC BX650LI-MS)	2	
11	21/04/2017	Epson Printer (L 385)	1	
12	25/04/2017	Laptop HP Business ProBook 430 G4	5	
13	25/04/2017	Penghancur Kertas Secure Maxi 25 SCM	1	
14	25/04/2017	Printer Canon Pixma (G1000)	1	
15	26/04/2017	UPS (BX1100LI-MS)	5	
16	26/04/2017	Cable Power for UPS (B-Save AC Power Cord 1,8 M)	5	
17	26/04/2017	Inverter Prolink IPS 2400	1	

Tabel 2.8
TABEL ALOKASI ANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

No	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (APBD)
	BELANJA LANGSUNG	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.438.742.490,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.900.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.200.000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.755.000
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	13.800.000
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.067.555.000
6	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	10.000.000
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.000.000
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	110.000.000
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.200.000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	9.000.000
13	Penyediaan makanan dan minuman	45.250.000
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	641.779.500
15	Rapat-Rapat Kooridnasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	319.200.000,20
B	Program Peningkatan Ssarana dan Prasarana Aparatur	135.000.000
1	Penyewaan Rumah/Gedung.Gudang Parkiran Kantor Dinas	0
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	135.000.000
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	255.000.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	255.000.000

D	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5.334.166.341
1	Pengadaan alat studio dan komunikasi	110.300.000
2	Monitoring Jaringan Telekomunikasi dan Pendataan KIM	69.280.000
3	Rapat Koordinasi Teknis Komunikasi dan Informatika	140.509.700
4	Pengelolaan nama Domain Daerah	184.680.000
5	Masterplan, Infrastruktur, dan Pengembangan E-Government	4.829.369.641
E	Program Peningkatan Layanan Pengadaan	4.011.920.000
1	Pengelolaan dan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2.988.760.000
2	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	599.030.000
3	Rapat Koordinasi Bidang LPSE	315.220.000
4	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	108.910.000
F	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	1.142.376.000
1	Penyebaran Informasi Statistik Sektoral	422.783.000
2	Penyebaran informasi Statistik Sektoral	196.245.600
3	Penyediaan Peralatan Infrastruktur Statistik Sektoral	282.490.000
4	Pengembangan dan Pembinaan SDM Bidang Statistik	240.858.000
G	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	1.069.850.000
1	Tata Kelola Persandian	278.250.000
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar perangkat Daerah	94.000.000
3	Pembinaan SDM Persandian	215.200.000
4	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi di Daerah	98.000.000
5	Sosialisasi keamanan Informasi	325.700.000
6	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Bidang persandian	58.700.000

H	Program Peningkatan layanan Informasi Publik	1.339.700.000
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	280.800.000
2	Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Daerah	570.900.000
3	Pengelolaan informasi Melalui Desk PPID	406.000.000
4	Bimtek Efektifitas Penyebaran Informasi Publik	82.000.000
JUMLAH		16.269.950.441,20

BAB III

EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Realisasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan implementasi dari Renja yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa perbedaan antara Renja dan Implementasi Program dan Kegiatan yang dijalankan. Hal ini dikarenakan penyusunan Renja tahun 2019 dengan kondisi penyesuaian beberapa bidang yang tergabung antara lain Statistik, Persandian dan LPSE. Beberapa kegiatan tidak dapat diakomodir mengingat terbatasnya anggaran sehingga dilakukan pelaksanaan kegiatan yang selektif sesuai dengan prioritas penunjang utama perwujudan visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Permasalahan tersebut sebagai bahan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya dapat terealisasi dengan baik dan maksimal. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel 3.1.

TABEL 3.1
Realisasi Program dan Kegiatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	TOTAL REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp.)
			Keuangan (Rp.)	Presentase	
1	2	3	4	5	6
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.743.305.332	18.944.398.651	87,13	2.798.906.681
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.473.354.891	4.942.984.295	90,31	530.370.596
	BELANJA LANGSUNG	16.269.950.441	14.001.414.356	86,06	2.268.536.085
2.10. ..2.10.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.981.937.500	2.407.071.213	80,72	574.866.287
2.10. ..2.10.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.900.000	8.066.000	62,53	4.834.000
2.10. ..2.10.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000	12.825.582	17,81	59.174.418
2.10. ..2.10.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.755.000	5.918.000	37,56	9.837.000
2.10. ..2.10.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	18.000.000	6.199.600	34,44	11.800.400
2.10. ..2.10.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.337.128.000	992.335.422	74,21	344.792.578
2.10. ..2.10.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15.000.000	4.698.900	31,33	10.301.100
2.10. ..2.10.01.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25.000.000	1.120.000	4,48	23.880.000
2.10. ..2.10.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	117.250.000	93.476.120	79,72	23.773.880

2.10. ...2.10.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.200.000	46.273.950	82,34	9.926.050
2.10. ...2.10.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	8.475.000	2.080.000	24,54	6.395.000
2.10. ...2.10.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	289.000.000	281.840.500	97,52	7.159.500
2.10. ...2.10.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	9.000.000	6.160.000	68,44	2.840.000
2.10. ...2.10.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	45.250.000	15.976.400	35,31	29.273.600
2.10. ...2.10.01.01.01.18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	641.779.500	617.505.369	96,22	24.274.131
2.10. ...2.10.01.01.01.19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	319.200.000	312.595.370	97,93	6.604.630
2.10. ...2.10.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	135.000.000	89.190.056	66,07	45.809.944
2.10. ...2.10.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	135.000.000	89.190.056	66,07	45.809.944
2.10. ...2.10.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	255.000.000	225.769.592	88,54	29.230.408
2.10. ...2.10.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	255.000.000	225.769.592	88,54	29.230.408
2.10. ...2.10.01.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5.334.166.341	4.740.924.746	88,88	593.241.595
2.10. ...2.10.01.01.15.05	Pengadaan alat studio dan komunikasi	110.300.000	96.085.000	87,11	14.215.000
2.10. ...2.10.01.01.15.07	Monitoring Jaringan Telekomunikasi dan Pendataan KIM	69.280.000	58.268.000	84,11	11.012.000
2.10. ...2.10.01.01.15.19	Rapat Koordinasi Teknis Komunikasi dan Informatika	140.509.700	120.247.000	85,58	20.262.700
2.10. ...2.10.01.01.15.21	Pengelolaan Nama Domain Daerah	184.680.000	164.852.343	89,26	19.827.657
2.10. ...2.10.01.01.15.22	Masterplan Infrastruktur dan Pengembangan E-Government	4.829.396.641	4.301.472.403	89,07	527.924.238

2.10. ..2.10.01.01.17	Program Peningkatan Layanan Informasi Publik*	1.339.700.000	1.161.995.514	86,74	177.704.486
2.10. ..2.10.01.01.17.01	Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah*	280.800.000	270.897.264	96,47	9.902.736
2.10. ..2.10.01.01.17.02	Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Daerah	570.900.000	503.297.229	88,16	67.602.771
2.10. ..2.10.01.01.17.03	Pengelolaan Informasi Melalui Desk PPID*	406.000.000	341.561.403	84,13	64.438.597
2.10. ..2.10.01.01.17.05	Bimtek Efektifitas Penyebaran Informasi Publik*	82.000.000	46.239.618	56,39	35.760.382
2.10. ..2.10.01.01.18	Program Peningkatan Layanan Pengadaan	4.011.920.000	3.519.819.824	87,73	492.100.176
2.10. ..2.10.01.01.18.01	Pengelolaan dan operasional layanan pengadaan secara elektronik	2.988.760.000	2.919.614.253	97,69	69.145.747
2.10. ..2.10.01.01.18.02	Bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah	599.030.000	274.837.779	45,88	324.192.221
2.10. ..2.10.01.01.18.03	Rapat koordinasi bidang LPSE	315.220.000	284.556.292	90,27	30.663.708
2.10. ..2.10.01.01.18.04	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik*	108.910.000	40.811.500	37,47	68.098.500
2.10. ..2.10.01.01.31	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah*	1.142.376.600	917.779.189	80,34	224.597.411
2.10. ..2.10.01.01.31.01	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Sektoral*	422.783.000	344.413.165	81,46	78.369.835
2.10. ..2.10.01.01.31.02	Penyebaran Informasi Statistik Sektoral*	196.245.600	144.894.000	73,83	51.351.600
2.10. ..2.10.01.01.31.03	Penyediaan Peralatan Infrastruktur Statistik Sektoral*	282.490.000	267.948.370	94,85	14.541.630
2.10. ..2.10.01.01.31.04	Pengembangan dan Pembinaan SDM Bidang Statistik*	240.858.000	160.523.654	66,65	80.334.346
2.15. ..2.10.01.01.15	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi*	1.069.850.000	938.864.222	87,76	130.985.778

2.15. ...2.10.01.01. 15. 01	Tata Kelola Persandian	278.250.000	267.297.943	96,06	10.952.057
2.15. ...2.10.01.01. 15. 02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah*	94.000.000	88.366.858	94,01	5.633.142
2.15. ...2.10.01.01. 15. 04	Pembinaan SDM Persandian	215.200.000	203.509.503	94,57	11.690.497
2.15. ...2.10.01.01. 15. 06	Operasional Pengamanan Persandian	98.000.000	84.496.895	86,22	13.503.105
2.15. ...2.10.01.01. 15. 07	Sosialisasi Keamanan Informasi	325.700.000	243.522.294	74,77	82.177.706
2.15. ...2.10.01.01. 15. 08	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Bidang Persandian	58.700.000	51.670.729	88,03	7.029.271

3.2 Capaian Kinerja

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika disampaikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Gubernur Kalimantan Utara. Untuk Perjanjian Kinerja disampaikan sebagaimana terlampir, adapun target kinerja Kepala SKPD disajikan pada tabel 3.2

TABEL 3.2
TARGET KINERJA KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Strategis	IKU / Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Kinerja	Program / Kegiatan
				Capaian	%
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	Presentase OPD yang Mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	10 %	14%	140 %
2.	Terwujudnya Jaminan Terhadap Pengamanan Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Presentase OPD yang menggunakan Pelayanan Persandian	10 %	45,23 %	452,3 %
3.	Tingkat Keterbukaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Presentase data/informasi yang dipublish	30 %	57,14 %	190 %

TABEL 3.3

URAIAN CAPAIAN KINERJA KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Uraian Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke – 1: “Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)”		
No.	PENJELASAN	URAIAN
1	2	3
a.	Penjelasan Umum tentang Sasaran dan Indikator, serta rumusan penghitungan	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) merupakan peningkatan layanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berbasis elektronik, sehingga meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara efektif, efisien dan akuntabel. Rumusan perhitungan merupakan prosentase jumlah OPD yang menggunakan SPBE terhadap jumlah seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
b.	Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target).	Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2018 adalah dengan penyusunan perencanaan pengembangan E-Government serta pembangunan infrastruktur Tahap I, dan Perencanaan Pembangunan Jaringan Internet Provinsi Kalimantan Utara (sarana penunjang pengembangan E-Government berupa perencanaan pembangunan Fiber Optik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Hingga akhir tahun 2018, terdapat sejumlah 6 (Enam) OPD yang didata memiliki SPBE yang diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh OPD lainnya, yaitu: BPKAD (Simda), Bappeda(E-Planning), Biro Pembangunan (E-Pengendalian, TEPPRA), Biro Organisasi (E-Sakip), Badan Kepegawaian Daerah (E-Kinerja, SIAO, E-SKP), dan Diskominfo (PPID, E-Proc, E-Katalog).

c.	Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Pada tahun sebelumnya telah dilaksanakan sosialisasi/Bimtek terkait implementasi E-Office di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
d.	Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.	Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan leading sector yang bertugas mengkoordinir dan melakukan penataan untuk urusan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government).
e.	Outcome dan Output Program dan Kegiatan serta Penyerapan Anggaran	Outcome berupa cakupan layanan infrastruktur Komunikasi, informasi dan Media Massa sebesar 85%. Penyerapan anggaran pada program ini sebesar 88,88 % dan realisasi fisik sebesar 93,98%. Seluruh kegiatan yang terdapat pada program ini telah terlaksana dengan baik, untuk belanja modal telah terselesaikan dengan baik.
f.	Faktor Pendukung Capaian Kinerja	Program kegiatan yang telah terencana dengan baik pada tahun sebelumnya (telah dilakukan sosialisasi dan Bimtek) sehingga pada tahun anggaran 2018 telah dipersiapkan program dan kegiatan secara matang, serta dukungan prasarana berupa ruangan yang disiapkan untuk server.
g.	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi teknis dalam implementasi dan pengawasan E-Government.
h.	Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Tahun yang akan datang	Melakukan peningkatan sumber daya aparatur, peningkatan perencanaan integrasi E-Government di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

<p align="center">Uraian Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 :</p> <p align="center">“Terwujudnya Jaminan Terhadap Pengamanan Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”</p>		
No.	PENJELASAN	URAIAN
1	2	3
a.	Penjelasan Umum tentang Sasaran dan Indikator serta rumusan penghitungan	Pengamanan data dan informasi terkait pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan khusus yang harus dipenuhi sebagai wujud implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik terkhusus informasi yang dikecualikan yang menyangkut pengambilan kebijakan yang bersifat rahasia untuk menjaga wibawa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Serta dalam implementasi penyediaan pengamanan persandian di lapangan pada saat kunjungan pejabat negara di wilayah Kalimantan Utara. Rumusan perhitungan adalah jumlah instansi/OPD yang menggunakan pelayanan persandian terhadap jumlah seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
b.	Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target).	Pelaksanaan Program kegiatan dalam wujud kinerja nyata antara lain penyediaan penunjang pengamanan persandian di lapangan. Pada tahun ini akan diadakan peralatan persandian antara lain Jammer dan Counter Surveillance. Hingga saat ini, terdapat 19 OPD yang secara langsung maupun tidak langsung telah memanfaatkan layanan persandian dalam pengiriman/penerimaan surat melalui aplikasi SANAPATI.
c.	Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Pada tahun sebelumnya dilaksanakan perencanaan peralatan perlengkapan peralatan kamar sandi. Dan juga diperkuat dengan telah dilaksanakannya koordinasi ke Lembaga Sandi Negara (yang kini bernama Badan Siber dan Sandi Negara). Sehingga disampaikan bahwa dari Lembaga Sandi Negara akan memberikan

		bantuan peralatan persandian pendukung kinerja Sandi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
d.	Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi merupakan salah satu urusan yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Bidang ini mencakup operasional pengamanan persandian, tata kelola persandian dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan persandian di Wilayah Kalimantan Utara.
e.	Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta Penyerapan Anggaran	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi memiliki outcome berupa presentasi kabupaten/kota yang memiliki pola hubungan komunikasi sandi dengan target kinerja Tahun Anggaran 2018 sebesar 20%. Pencapaian hingga akhir tahun 2018 menunjukkan capaian yang sangat baik. Realisasi keuangan sebesar 87,76 % diiringi dengan realisasi fisik sebesar 97,92%. Hal ini tercapai melalui koordinasi yang baik dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta dengan adanya bantuan peralatan yang akan diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur bidang persandian telah terlaksana dengan baik. Dukungan peralatan dengan terealisasinya belanja modal Peralatan Counter Surveillance.
f.	Faktor Pendukung Capaian Kinerja	Perencanaan pelaksanaan yang telah disusun tahun sebelumnya, sehingga implementasi pada tahun ini dapat terukur. Serta dukungan dari Pusat (BSSN) berupa hasil koordinasi dan pemberian alat pendukung pelaksanaan kinerja bidang persandian (alat jamming). Serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang persandian telah dilaksanakan dengan baik.
g.	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Masih diperlukan penambahan aparatur yang memiliki kemampuan teknis bidang persandian (terutama keahlian peralatan persandian) serta dukungan kebutuhan peralatan kamar sandi.

h.	Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Tahun yang akan datang	Melakukan peningkatan kapasitas atau pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur serta pemenuhan peralatan kamar sandi.
<p align="center">Uraian Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 :</p> <p align="center">“Tingkat Keterbukaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara”</p>		
No.	PENJELASAN	URAIAN
1	2	3
a.	Penjelasan Umum tentang Sasaran dan Indikator serta rumusan penghitungan	Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam mendukung pemerintahan yang bersih, transparan dan berwibawa, maka informasi mengenai Kinerja Pemerintahan wajib untuk diketahui masyarakat. Dalam implementasinya, informasi yang disampaikan pada masyarakat terdiri dari informasi yang disampaikan secara berkala, diumumkan secara serta merta, informasi yang harus tersedia setiap saat, serta informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan. Adapun informasi yang dikecualikan merupakan informasi yang perlu dipertimbangkan untuk tidak dipublikasikan. Maksud sasaran strategis ke-3 ini adalah gambaran prosentase keterbukaan informasi yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dapat diakses oleh masyarakat. Informasi tersebut merupakan informasi yang terklasifikasi sesuai dengan aturan (UU No. 14 Tahun 2008). Sehingga darisejumlah informasi yang diklasifikasikan di tiap instansi akan dihitung prosentasi informasi yang dipublish. Rumusan perhitungan merupakan presentase informasi yang dipublish sesuai klasifikasi dibandingkan dengan informasi yang seharusnya dipublish.
b.	Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target).	Dinas Komunikasi dan Informatika telah mempersiapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang memiliki tugas melayani

		setiap permintaan informasi yang diajukan oleh masyarakat. Disamping itu, telah disediakan juga layanan informasi berupa website, sehingga tiap instansi yang mau mempublish informasi dapat berkoordinasi dengan Pengelola atau operator PLID. Adapun dalam menyampaikan sasaran strategis tersebut, dilakukan bimtek/sosialisasi terkait keterbukaan informasi. Hingga saat ini terdapat 24 OPD yang telah mempublish informasi yang tergolong informasi yang tersedia secara berkala, serta merta dan setiap saat.
c.	Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Pada tahun anggaran sebelumnya telah dilaksanakan sosialisasi terkait keterbukaan informasi dan perencanaan akan dilakukan penyusunan tim pengelola informasi dan dokumentasi.
d.	Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.	Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai instansi yang bertugas mengelola, mengkoordinasi dan mengawasi jalannya keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
e.	Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta Penyerapan Anggaran	Terdapat tiga program yang menaungi sasaran strategis ini, yaitu Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan outcome persentase sektor yang memiliki data/informasi statistik yang mutakhir, Program Peningkatan Layanan Pengadaan dengan outcome Cakupan Layanan Pengadaan, dan Program Peningkatan Layanan informasi Publik dengan outcome presentase cakupan layanan informasi publik. Pada penyerapan anggarandari setiap program terealisasi berupa perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka koordinasi dengan instansi pusat.
f.	Faktor Pendukung Capaian Kinerja	Sosialisasi yang dilakukan dengan baik sehingga instansi lain dapat bekerjasama dengan baik dengan Dinas Kominfo. Untuk kelanjutan pelaporan dari setiap instansi telah terlaksana dengan cukup baik, hal ini didukung oleh koordinasi yang baik.

g.	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Pemenuhan informasi yang harus tersedia setiap saat dan berkala masih belum optimal serta kuantitas sumber daya aparatur yang masih kurang.
h.	Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Triwulan / Tahun yang akan datang	Retensi dan inventarisasi informasi yang wajib dipublish serta uji konsekuensi.

3.3 Capaian Program Kegiatan

Capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tentunya diharapkan memiliki manfaat yang baik untuk meningkatkan kinerja aparatur ataupun bagi masyarakat. Gambaran capaian program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara hingga akhir tahun anggaran 2019 disampaikan pada tabel 3.3.

TABEL 3.3**LAPORAN CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN HINGGA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	PROGRAM/KEGIATAN	NILAI KONTRAK (Rp)	HASIL (KELUARAN) KEGIATAN s/d 31 DESEMBER 2017	MANFAAT PROGRAM/KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Tata Kelola Persandan	198.000.000,00	- Terpenuhinya dan terlaksananya penyediaan peralatan persandian (Counter Surveillance)	Tersedianya peralatan persandian berupa Counter Surveillance	1 (Satu) Alata Counter Surveillance
2.	Pembinaan SDM Persandian	-	- Meningkatnya pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait fungsi dan peranan Persandian bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Tersedianya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memahami tentang fungsi dan peranan persandian bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Terdidiknya sejumlah 70 (Tujuh Puluh) orang ASN bidang Persandian
3.	Penetapan pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah	94.000.000	Melakukan kegiatan seminar budaya kesadaran keamanan informasi.	Untuk menumbuhkan kesadaran tentang pemanfaatan persandian guna keamanan informasi dalam penetapan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah	Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2018 di Hotel Crwon Tanjung Selor, Narasumber dari BSSN dan

					BSrE Jakarta, diikuti oleh perwakilan seluruh OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan 20 orang CPNS.
4.	Sosialisasi Keamanan Informasi	325.700.000	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kegiatan sosialisasi keamanan informasi dengan tema "secure government awareness" - Melakukan kegiatan sosialisasi keamanan informasi dengan tema " Fungsi dan peran 	Dalam rangka memberikan wawasan serta pengetahuan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi tentang pentingnya keamanan informasi di sistem pemerintahan.	Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2018 di Gedung Gadis lantai 1 Tanjung Selor, Narasumber dari BSSN dan BSrE Jakarta, diikuti oleh perwakilan seluruh OPD di lingkup Pemerintah

			persandian bagi pemerintah daerah”	Dalam rangka memberikan wawasan serta pengetahuan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Nunukan tentang tugas dan fungsi Bidang persandian dalam pengamanan informasi milik pemerintah daerah.	Provinsi dan 30 orang CPNS. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2018 di Meeting Room VIP Lt. 4 Kantor Bupati Nunukan, Narasumber dari BSSN dan BSR Jakarta, diikuti oleh perwakilan seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Nunukan.
5.	Monitoring, Evaluasi dan pengawasan Bidang Persandian	58.700.000	Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan persandian di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara	Untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi hambatan dan upaya perbaikan Dalam	Dilaksanakan di Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan,

				penyelenggaraan persandian.	Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan.
6.	Penyelenggaraan pengamanan informasi di daerah	98.000.000	Melakukan kegiatan Sosialisasi dan Analisis kebutuhan penerapan sertifikat elektronik sesuai alur layanan penerapan sertifikat elektronik dari Balai sertifikasi Elektronik (BSrE)	Mensosialisasikan tentang penerapan tanda tangan digital pada sistem elektronik dan melakukan analisis kebutuhan sistem perizinan.	Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) pada tanggal 4 Desember 2018 di ruang rapat lantai 3 kantor Gubernur dan diteruskan dengan kegiatan analisis kebutuhan sistem perizinan di DPMPTSP Provinsi

					Kalimantan Utara.
7.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Infrastruktur Statistik Sektoral	253.412.500	Tersedianya peralatan Infrastruktur Statistik Sektoral	Menampilkan data-data statistik sektoral berbagai OPD yang dapat dibagi pakai sesuai kebutuhan	1 aplikasi (SIDARA CANTIK)
8.	Penyebaran Informasi Statistik Sektoral	75.350.000	Banyaknya Sektor yang memiliki Data/Informasi Statistik yang Mutakhir dalam bentuk buku data statistik Kalimantan Utara	Sebagai sarana penyebarluasan informasi statistik sektoral ke OPD-OPD dilingkup Provinsi Kalimantan Utara	60 buku
9.	Penyusunan Dan Pengumpulan Data	422.783.000	Mengumpulkan data statistik sektoral sebanyak 40 OPD dan 5 Kabupaten/Kota	Untuk memperoleh data statistik sektoral	dokumen statistik sektoral
10.	Pengembangan Dan Pembinaan SDM Bidang Statistik	240.858.000	40 Pengolah data OPD dan 5 Kab/Kota	Untuk melatih Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan data statistik sektoral	40 pengolah data OPD dan 5 kab/kota
11.	Pengelolaan dan Operasional Layanan pengadaan Secara Elektronik	2.988.760.000	Penyediaan operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik selama 12 Bulan	Terselenggaranya layanan pengadaan secara elektronik dengan baik	442 Jumlah Paket yang dilayani dengan rincian lelang umum 63 Paket konstruksi diatas nilai Rp. 5 Milyar, lelang sederhana 44 Paket senilai

					antara Rp. 200 Juta –Rp. 5 Milyar, Seleksi umum 88 Paket Jasa Konsultasi diatas Rp. 200 Jt, Seleksi Sederhana 63 Paket Jasa Konsultasi antara Rp. 100 Jt – Rp. 200 Jt, serta pemilihan langsung 155 Paket Kontruksi antara Rp. 200 jt – Rp. 5 Milyar, 28 Tender dan 1 Tender Cepat
12.	Rapat Koordinasi Bidang LPSE		<p>Rapat Koordinasi Bidang LPSE telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :</p> <p>1). 2 s.d 3 April 2018 dengan tema "Peningkatan Mutu Pelayanan melalui percepatan pemenuhan 17 Standarisasi LPSE:2014"</p>	<p>Berikut manfaat kegiatan Rakor Bidang LPSE :</p> <p>1) Peningkatan sumber daya aparatur di bidang pengadaan barang/jasa secara elektronik;</p> <p>2) Mempercepat pemenuhan 17 Standarisasi LPSE:2014 bagi</p>	<p>Telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Bidang LPSE sebanyak 2 (dua) kali di Tanjung Selor</p>

			<p>2). 5 s.d 6 November 2018 dengan tema "Sinergi LPSE dalam rangka penerapan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menuju Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang lebih baik".</p> <p>Dengan peserta dari 5 (lima) Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara dan 1 (satu) Provinsi Kalimantan Utara</p>	<p>Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara.</p> <p>3) Menampung aspirasi dan masukan dari LPSE Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara untuk pemenuhan pelayanan yang lebih maksimal di bidang pengadaan barang jasa pemerintah.</p>	
13.	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	132.680.000	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi sejumlah 5 Kali	<p>Pelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan dengan peserta ASN dan Penyedia Barang/Jasa pada Instansi pemerintah. Bimbingan teknis Sistem informasi rencana Pengadaan barang jasa pemerintah (SiRUP) dilingkungan Provinsi Kalimantan Utara, Pelatihan Untuk Penyedia, Pelatihan untuk Non Penyedia yang terdiri dari PA/KPA dan PPK, Sosialisasi Perpres 16/2018</p>	Total kegiatan diikuti oleh 560 Peserta

				serta Pelatihan SPSE Versi 4.3 bagi PA/KPA dan PPK	
14.	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik	80.700.000	Pengumpulan data RAD PPK dan Korsubgah di Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Utara	Tercapainya monitoring RAD PPK dan Korsupgah di Kabupaten Kota di Kalimantan Utara	Pelaksanaan oleh seluruh ASN di Bidang LPSE
15.	Rapat Koordinasi Teknis Komunikasi dan Informatika	140.509.700,00	Pelaksanaan Rakortek Kominfo	Pertemuan antara Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika 5 Kab/Kota se Kalimantan Utara dalam membahas teknis pelaksanaan Komunikasi dan Informatika, Statistik Sektoral, dan Persandian serta keamanan informasi	Kegiatan dilaksanakan di Hotel Grand Pangeran Khar pada Bulan Februari 2018
16.	Pengadaan alat studio dan komunikasi	110.300.000	Penyediaan perangkat Media Center	Hibah Pemancar Relay ke RRI dan Peliputan kegiatan	Penyediaan berupa 1 Paket Pemancara (dihibahkan ke RRI) dan 1 Unit Lensa Zoom

17.	Monitoring Jaringan Telekomunikasi dan Pendataan KIM	69.280.000	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring Broadband dan Infrastruktur Telekomunikasi	Pendataan sarana dan prasarana telekomunikasi khususnya area publik sebagai bahan evaluasi pengambilan kebijakan	1 Dokumen Data
18.	Pengelolaan nama Domain Daerah	184.680.000	Jumlah Domain daerah yang dikelola	Penyediaan nama domain daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Perawatan dan sewa server hosting Email Kaltara
19.	Masterplan, Infrastruktur dan Pengembangan E-Government	4.829.369.641	Jumlah instansi yang terlayani dengan sistem E-Government	Kegiatan ini bertujuan untuk melayani instansi yang membutuhkan layanan E-Government, hingga saat ini pemenuhan infrastruktur masih dilaksanakan dan beberapa instansi yang mengimplementasikan E-Government mendapat rekomendasi dari dinas kominfo	
20.	Bimtek Efektifitas Penyebaran Informasi Publik	82.000.000	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Penyebaran Informasi Publik	Pelaksanaan sejumlah 4 (empat) orang mengikuti bimtek Kehumasan	
21.	Pengelolaan Informasi Melalui Desk PPID	406.000.000	Penyediaan Pengelolaan Informasi Melalui Desk PPID berupa optimalisasi layanan PPID	Pengelolaan layanan Desk PPID sebagai wujud	

			(Operator, aplikasi dan pendukung lainnya)	dukungan Keterbukaan Informasi Publik	
22.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	280.000.000	Jumlah Pameran/Expo yang diikuti/diadakan	Memperkenalkan keberagaman dan keunikan daerah Kalimantan Utara pada Pameran Tingkat Nasional	Pameran Nasional dilaksanakan di Batam pada 21-26 November 2018
23.	Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Daerah	570.900.000	Presentase penyelesaian Sengketa Informasi	Salah satu wujud Keterbukaan Informasi Publik yaitu pemberian fasilitas Penyelesaian Sengketa Informasi di Daerah	Hingga akhir 2018 belum ada sengketa informasi yang dilayani, namun telah ada informasi masuk terkait sengketa informasi

3.4 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan program/kegiatan serta Rencana Tindak Lanjut pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara disampaikan pada tabel 3.4.

TABEL 3.4

PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No.	ProgramKegiatan	Permasalahan	Tindak Lanjut
1.	Tata Kelola Persandan	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan	
2.	Pembinaan SDM Persandian	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan	
3.	Penetapan pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan	
4.	Sosialisasi Keamanan Informasi	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan	
5.	Monitoring, Evaluasi dan pengawasan Bidang Persandian	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan	
6.	Penyelenggaraan pengamanan informasi di daerah	Berdasarkan Kebijakan dari BSrE, bahwa PKS yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2018 merupakan kegiatan PKS terakhir tahun 2018, maka PKS antara Dinas Kominfo Prov. Kaltara dan pihak BsrE belum bisa dilaksanakan.	Untuk memenuhi target PKS dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut antara Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Utara dengan Pihak Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

7.	Penyediaan Peralatan Infrastruktur Statistik Sektoral	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan	
8.	Penyebaran Informasi Statistik Sektoral	Tidak terlaksananya pengadaan cetak Leaflet karena data yang masuk ke Dinas Kominfo dari berbagai OPD mengalami keterlambatan dari jadwal penginputan	Pada pengumpulan data tahun 2019 diagendakan semua data harus terkumpul pada awal tahun, sehingga pengerjaan leaflet bisa terlaksana sebagaimana mestinya
9.	Penyusunan Dan Pengumpulan Data	Tidak terlaksananya kegiatan survey karena keterbatasan personil dan cara pengumpulan data yang dilaksanakan yaitu kompilasi/mengumpulkan data produk administrasi	Menganggarkan kembali pada tahun 2019
10.	Pengembangan Dan Pembinaan SDM Bidang Statistik	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan	
11.	Pengelolaan dan Operasional Layanan pengadaan Secara Elektronik	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan	
12.	Rapat Koordinasi Bidang LPSE	Sesuai kesepakatan bersama hasil Rakor LPSE pada tanggal 5 September s/d 6 November 2018, salah satu kesepakatannya adalah LPSE di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan pembinaan kepada LPSE Kabupaten/Kota yang belum memenuhi 17 Standarisasi LPSE:2014	Pembinaan kepada LPSE Kabupaten/Kota akan dilaksanakan Tahun 2019 dengan kegiatan monitoring secara intensif guna pemenuhan 17 Standarisasi LPSE

		dan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di tahun 2018	
13.	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan	
14.	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan	
15.	Rapat Koordinasi Teknis Komunikasi dan Informatika	Kegiatan tidak sesuai urusan Bidang Kominfo	Kegiatan direkomendasikan ke Sub Bagian Perencanaan
16.	Pengadaan alat studio dan komunikasi	RKA dan DPA tidak sesuai dengan Kebutuhan	Anggaran perubahan dari 2 Unit Perangkat menjadi 1 Unit Perangkat
17.	Monitoring Jaringan Telekomunikasi dan Pendataan KIM	<ul style="list-style-type: none"> -Kurangnya Sosialisasi dan pembinaan KIM -Tidak tersedianya data KIM -Belum lengkapnya data sarana dan prasarana telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembinaan dan sosialisasi KIM - Monitoring dan Evaluasi KIM - Melakukan pemutakhiran data sarana dan prasarana Telekomunikasi
18.	Pengelolaan nama Domain Daerah	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan	
19.	Masterplan, Infrastruktur dan Pengembangan E-Government	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan	

20.	Bimtek Efektifitas Penyebaran Informasi Publik	Kesalahan dalam penginputan kode rekening untuk biaya kontribusi mengikuti kegiatan Bimtek	Melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku
21.	Pengellaan Informasi melalui Desk PPID	Belum terdapat permasalahan	
22.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Belum terdapat permasalahan	
23.	Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Penyediaan operasional masih minim akibat efisiensi anggaran	Melakukan prioritas untuk penyediaan operasional Penyelesaian Sengketa Informasi

Secara garis besar, beberapa permasalahan yang dihadapi pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- Implementasi Renja 2018 pada saat dituangkan menjadi RKA 2018 terdapat perubahan substansi kegiatan yang disesuaikan dengan arah kebijakan pimpinan.
- Sesuai dengan penganggaran tahun 2018, telah dilakukan efisiensi anggaran sehingga beberapa program dan kegiatan disesuaikan tingkat prioritas.
- Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan.
- Kurangnya personil yang memahami teknis pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan berjalan tidak sesuai dengan rencana aksi.
- Terdapat beberapa kegiatan yang rencananya akan dirasionalisasi dikarenakan menurut pandangan tidak akan terealisasi sehingga akan dilakukan penyesuaian pada perancangan APBD-P Tahun Anggaran 2018.

Sedangkan untuk tindak lanjut secara garis besar adalah sebagai berikut:

- Menambah jumlah aparatur yang berkompeten dalam penyusunan program/kegiatan.
- Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran.
- Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana.

- d. Merasionalisasikan anggaran pada kegiatan yang dimungkinkan tidak dapat berjalan sebagai akibat belum adanya keputusan dari Pemerintah Pusat dan meninjau ulang/mengganti indikator kegiatan (*output*, target, dan *outcome*) dan kelompok sasaran agar kegiatan tersebut dapat terlaksana pada APBD-P.

BAB IV

KESIMPULAN

Laporan Akhir Tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 ini merupakan laporan yang disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan rencana strategis guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara.

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran agar kedepan jika ditemukan permasalahan yang sama supaya dapat ditindak lanjuti secara cepat dan cermat.

Akhirnya dengan terusunnya Laporan Akhir Tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 yaitu *“Berpada dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2021 yang Mandiri, Aman dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”*.